

INTISARI

URGENSI PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN LISTRIK

Oleh

Ridho Dwi Saputra*, Sigid Riyanto**

Penelitian ini bermaksud untuk memberikan kajian terhadap pentingnya penerapan keadilan restoratif untuk menyelesaikan peristiwa pencurian listrik melalui jalur penegakan hukum pidana. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya jumlah pencurian listrik di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menimbulkan kerugian bagi PT PLN (Persero) dan memengaruhi keandalan sistem ketenagalistrikan nasional. Hal tersebut disebabkan oleh kebijakan PT PLN (Persero) UP3 Yogyakarta yang menempuh penyelesaian melalui jalur administrasi yang tidak dapat memberikan efek jera.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode normatif-empiris, dengan mengombinasikan kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta hasil penelitian lapangan melalui wawancara dengan aparat penegak hukum serta pegawai PLN di Yogyakarta. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah kerangka hukum yang mengatur tindak pidana di bidang ketenagalistrikan, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menggambarkan praktik penegakan hukum dan penyelesaian kejadian pencurian listrik di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan dua kesimpulan: Pertama, problematika pencurian listrik dilihat dari aspek struktur hukum, dalam beberapa tahun belakangan ini belum ada perbuatan pidana terkait pencurian listrik diajukan hingga pengadilan karena adanya kebijakan PT PLN (Persero) UP3 Yogyakarta yang menyelesaikan pencurian listrik melalui jalur administrasi, dari aspek substansi hukum, terdapat ketentuan pidana yang dapat diterapkan terhadap pencurian listrik, namun PT PLN (Persero) UP3 Yogyakarta menempuh penyelesaian melalui jalur administrasi, dari aspek budaya hukum, masyarakat semakin permisif melakukan pencurian listrik karena ketiadaan efek jera. Kedua, berdasarkan problematika tersebut melalui penegakan hukum pidana diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku maupun masyarakat, dan penerapan keadilan restoratif dapat dilaksanakan dalam proses penegakan hukum pidana tersebut agar dapat mewujudkan rasa keadilan masyarakat melalui pemulihan kembali terhadap kerugian yang dialami oleh PT PLN (Persero) yang disebabkan oleh pencurian listrik.

Kata kunci: Pencurian Listrik, Penegakan Hukum, Keadilan Restoratif

* Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Litigasi pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

** Dosen di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

ABSTRACT

THE URGENCY OF APPLYING RESTORATIVE JUSTICE IN HANDLING CRIMINAL ACTS IN THE ELECTRICITY SECTOR

By

Ridho Dwi Saputra *, Sigid Riyanto**

This study examines the significance of implementing restorative justice to resolve electricity theft through criminal law enforcement mechanisms. The research is driven by the rising incidence of electricity theft in the Special Region of Yogyakarta, which has caused financial losses for PT PLN (Persero) and undermined the reliability of the national power grid. This phenomenon stems from PT PLN (Persero) UP3 Yogyakarta's policy of prioritizing administrative settlements, which have proven ineffective in establishing a deterrent effect.

This research employs a normative empirical method by integrating an analysis of statutory regulations and legal doctrines with empirical field research conducted through interviews with law enforcement officials and PLN employees in Yogyakarta. The normative approach is used to examine the legal framework governing criminal offenses in the electricity sector, while the empirical approach is applied to describe law enforcement practices and the actual resolution of electricity theft cases in practice.

The findings indicate two primary conclusions: First, the problem of electricity theft, when viewed from the aspect of legal structure, reveals that in recent years, no criminal acts related to electricity theft have been prosecuted in court due to the administrative settlement policy of PT PLN (Persero) UP3 Yogyakarta. From the legal substance aspect, although criminal provisions are applicable to electricity theft, the company continues to pursue administrative channels. From the legal culture aspect, society has become increasingly permissive toward electricity theft due to the absence of a deterrent effect. Second, based on these problems, criminal law enforcement is expected to provide a deterrent effect for both perpetrators and the general public. Furthermore, the implementation of restorative justice within the criminal law enforcement process can realize a sense of social justice through the restoration of losses sustained by PT PLN (Persero) caused by electricity theft.

Keywords: Electricity Theft, Law Enforcement, Restorative Justice

* Graduate Student of the Master of Litigation Law Program, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada.

** Lecturer at the Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada.